

## **PENULISAN HUKUM**

### **Analisis Kedudukan Notaris Sebagai Pembuat Risalah Lelang Dalam Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaaan  
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:  
ILHAM ZAIN FADILA  
201310110311370



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**ANALISIS KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT RISALAH  
LELANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR: 2 TAHUN 2014  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN  
2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (UUJN)**

Diajukan Oleh:

**ILHAM ZAIN FADILA**

201310110311370

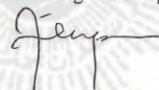
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 20 Januari 2018

Pembimbing Utama,

  
**Sofyan Arief, SH., M. Kn**

Pembimbing Pendamping,

  
**Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum**

Dekan,

  
**Dr. Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

  
**Nu'man Aunuh, SH., M.Hum**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**ILHAM ZAIN FADILA**

**201310110311370**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Sabtu 20 Januari 2018  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M. Kn

Sekretaris : Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Penguji I : Komariah, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilham Zain Fadila  
Nim : 201310110311370  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul :
2. **Analisis Kedudukan Notaris Sebagai Pembuat Risalah Lelang Dalam Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).**  
Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila ternyata didalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 2017  
Yang Menyatakan,

Ilham Zain Fadila

\

## MOTTO

“Berdo’a Kepada Allah SWT Dan Selalu Berusaha Dalam Hidup  
Adalah Kunci Kesuksesan Serta Sabar dan Ihlas Dalam Menjalani  
Setiap Ujian Yang Datang Dari Allah SWT”



“Hai orang-orang yang beriman,  
mintalah pertolongan (kepada Allah)  
dengan sabar dan shalat,  
sesungguhnya Allah  
beserta orang-orang yang sabar.”  
(QS. Al-Baqarah: 153)

**Analisis Kedudukan Notaris Sebagai Pembuat Risalah Lelang Dalam  
Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**

**Pembimbing : Sofyan Arief, S.H., M.Kn**

**: Dr Fifik Wiryani, S.H., M.S.I.,**

**Abstrak**

Kewenangan Notaris dalam membuat akta Risalah Lelang di dalam pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris merupakan suatu bentuk perluasan kewenangan terhadap Notaris dimana kewenangan umum Notaris adalah membuat akta autentik. Perumusan kewenangan membuat akta risalah lelang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berindikasi timbulnya pandangan mengapa tidak mengajukan proses pembuatan risalah lelang yang juga merupakan akta autentik ke hadapan notaris. maka dari itu dalam penelitian ini mencoba memberikan gambaran dan penjelasan secara rinci mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta Risalah di dalam UUN serta mengetahui pengaturan hukum mengenai risalah lelang menurut undang-undang yang berlaku. Penulisan Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi pustaka mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptif. Hasil penelitian pada penulisan skripsi ini adalah perumusan kewenangan Notaris membuat akta Risalah Lelang menjadi sia-sia, dikarenakan pemberian kewenangan Notaris untuk membuat akta Risalah Lelang tidak dapat diterapkan begitu saja. Kewenangan membuat akta Risalah Lelang hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang yang berhak, hal ini diatur dalam UUN dan VR beserta peraturan pelaksanaannya, sehingga kewenangan Notaris membuat akta risalah lelang dalam UUN tidak dapat dijalankan secara langsung karena harus memperhatikan Peraturan Lelang (*Vendu Reglement*) beserta peraturan pelaksanaannya yang merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai lelang. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Kewenangan Notaris membuat akta risalah lelang dalam UUN sama dengan kewenangan yang dimiliki Pejabat Lelang dalam hal ini Pejabat Lelang Kelas II karena Notaris yang menjalankan kewenangannya membuat akta Risalah Lelang melepaskan sementara jabatannya sebagai Notaris dan menggunakan jabatan sebagai Pejabat Lelang yang berpedoman pada Peraturan Lelang.

**Kata Kunci : Notaris, Risalah Lelang, Pejabat Lelang.**

## **Abstract**

Authority of Notary in making the Auction of Minutes of Acts in Article 15 paragraph (2) sub-paragraph g of Law Number. 2 year 2014 regarding the position of a Notary is a form of expansion of authority over a Notary Public, where the Public Notary's authority is to create an authentic deed. The formulation of the authority to make the auction document of the Notary Public Law indicates the emergence of a view of why not submit the process of making an auction paper which is also an authentic deed before the notary. therefore in this research try to give description and explanation in detail about the authority of Notary in making deed of Minutes in UUJN and to know the legal arrangement concerning auction treaty according to the applicable law. Writing This thesis uses the type of normative legal research, the problem approach used is a conceptual approach (Conceptual Approach). The technique of collecting legal materials is library study collecting primary, secondary, and tertiary legal materials, legal material analysis techniques using prescriptive techniques. The results of research on the writing of this thesis is the formulation of the Notary's authority to make the Auction of Minutes deed to be in vain, because the granting of the Notary's authority to make the Auction of Minutes deed can not be applied simply. The authority to issue a deed of Auction Minutes may only be conducted by a proper Auction Officer, this is regulated in the UUJN and VR and its implementing regulations, so that the authority of Notaris to make the auction of minutes of the UUJN law can not be executed directly because it must pay attention to the Vendu Reglement and its implementing regulations which is a special regulation governing the auction. From the result, it can be deduced that the Notary Authority makes the auction document of the UUJN with the authority owned by the Auction Official in this case the Class A Second Auction Officer because the Notary who executes his / her authority to make the Auction of Minutes deeds temporarily discharges his / her position as a Notary and uses the position of the Auction Officer shall be subject to the Auction Regulations.

**Keywords: Notary, Auction Minutes, Auction Official.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur Kepada Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul: “Analisis Kedudukan Notaris Sebagai Pembuat Risalah Lelang Dalam Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” Sholawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang penuh dengan rahmat ini.

Penulisan hukum ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis mengalami beberapa kendala dalam pengerjaanya, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak yang mendukung penulis, akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Tercinta HadiSupraptiberkat doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis dan Ayah Tersayang BapakZainuddinyang senantiasa mendidik dan menjaga putranya untuk menjadi anak yang mandiri. Terimakasih juga untuk adik-adikku telah memberikan motivasi untuk menjadi seorang sarjana. Terima kasih banyak untuk keluarga tercinta, terbaik yang selalu mendukung, memotivasi dan memberikan segalanya kepada penulis selama ini.
2. Bapak Drs. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang hingga terselesaikan program studi Strata 1 Ilmu Hukum
3. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.



4. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah membantu, membimbing, serta memberi dukungan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Sofyan Arief, S.H. M.Kn., selaku pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir juga menyetujui dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Ibu Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.S.I., M.Hum selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan membimbing penulis juga menyetujui dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Sofyan Arief, S.H.,M.Kn., selaku dosen pengarah yang telah memberikan penulis inspirasi dalam menentukan judul Tugas Akhir ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen, Tata Usaha dankeluarga besar Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang selalu mendorongdalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Notaris Endang Sri Kawuryan S.H.,M.Hum.,M.Kn. selaku ketua INI kota malang dan pejabat lelang kelas II Notaris Siti Noer Endah, S.H. M.Kn.,yang bersedia diwawancara oleh penulis selama penelitian.
10. Kakak Siska dan Riza yang senantiasa menemani suka maupun duka, mendukung, memberikan arahan, memberikan saran, menginspirasi, dan memberikan motivasi selama masa perkuliahan.
11. Teman-teman kontrakan, Dheking,Ino,Jumbo,Datuk yang selalu memberikan dukungan dan dorongan selama penulisan skripsi ini.
12. Para Sahabat-sahabatdanteman-teman yang tidak bias saya jabarkan masing-masing yang telah banyak berperan dalam segala hal.
13. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis dengan segala hormat dan kerendahan hati memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam penulisan skripsi ini melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi semua pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Malang, 09 Januari 2017

Penulis

Ilham Zain Fadila



## DAFTAR ISI

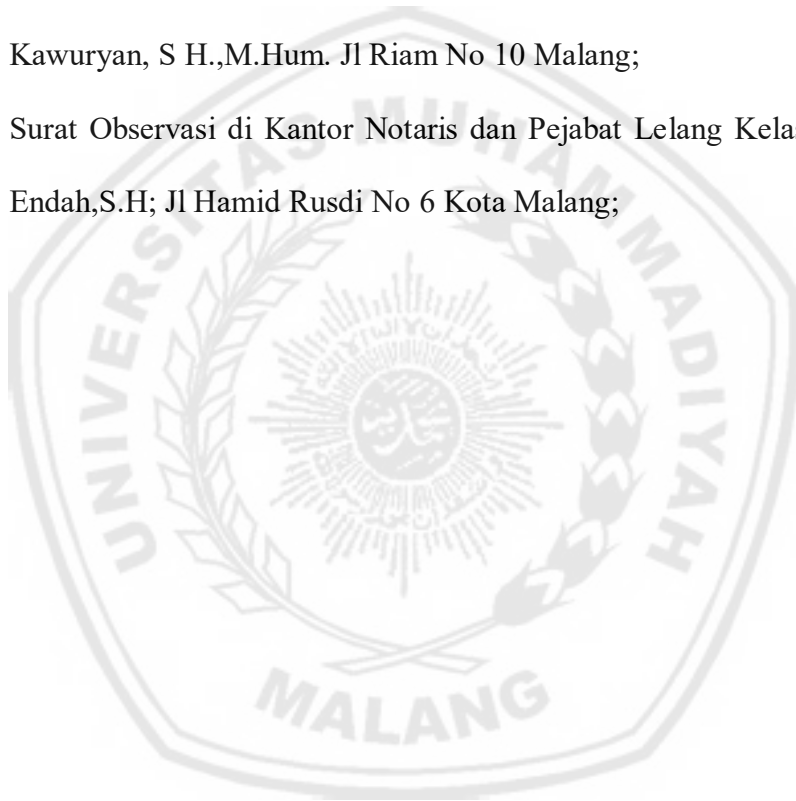
LEMBAR COVER / SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SEBELUM UJIAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN PENULISAN HUKUM.....	iii
UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan umum tentang jabatan notaris... ..	17
1. Pengertian Notaris.....	17
2. Syarat dan larangan Notaris.. ..	19
a. Syarat menjadi Notaris .....	19
b. Larangan menjadi seorang Notaris.....	21
3. Tugas dan Wewenang Notaris.....	22
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.....	26
a. Pengangkatan Notaris.....	26
b. Pemberhentian Notaris.....	28
5. Kode etik Notaris.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Lelang .....	32
1. Pengertian Lelang.....	32
2. Pihak-Pihak dalam Lelang.....	34
3. Tata Cara Lelang.....	36
4. Pengertian Risalah Lelang.....	40
a. Bagian Kepala risalah Lelang.....	40
b. Bagian Badan Risalah Lelang.....	41
c. Bagian Kaki Risalah Lelang.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Lelang.....	43
1. Pengertian Pejabat Lelang.....	43
2. Syarat-syarat Untuk Menjadi Pejabat Lelang.....	46
3. Tugas dan Wewenang Pejabat Lelang.....	50

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Kewenangan Notaris Dalam Membuat Risalah Lelang Menurut Peraturan Yang Berlaku.....	55
1. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Risalah Lelang Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.....	55
2. Pengaturan Hukum Tentang Lelang dan Risalah Lelang Menurut Peraturan Lelang Vendu Reglement Ordonatie 28 Februari 1908 dan Instruksi Lelang Vendu Instructie Staatblaad 1908:190.....	61
3. Pengaturan Hukum Tentang Lelang dan Risalah Lelang Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II.....	70
B. Peraturan yang Berlaku Mengenai Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Risalah Lelang.....	73
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
DAFTAR INDEKS.....	92
LAMPIRAN .....	94

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Tugas Penulisan Tugas Akhir
2. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir
3. Berita Acara Seminar Proposal Tugas Akhir
4. Daftar Hadir Peserta Seminar Proposal Tugas Akhir
5. Surat Observasi di Kantor Notaris dan Pejabat Lelang Kelas II Endang Sri Kawuryan, S H.,M.Hum. Jl Riam No 10 Malang;
6. Surat Observasi di Kantor Notaris dan Pejabat Lelang Kelas II Siti Noer Endah,S.H; Jl Hamid Rusdi No 6 Kota Malang;



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Budi Untung, (2001) *Visi Global Notaris* Yogyakarta, grafindo pustaka .
- G. H. S. Lumban Tobing, 1991, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*,
- NotodisrjoSoegondo, *hukum notaris di indonesiasuatu penjelasan*, Jakarta grafindo persada tahun 1993;
- SoegondoNotodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.,
- , 1993 *hukum notaris di indonesiasuatu penjelasan*, Jakarta grafindo persada tahun
- SoetarjoSoemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Yogyakarta, Liberty.
- Supriyadi, 2010, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika;
- Sutrisno & Wiwin Yulianingsih, 2016, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta, C.V Andi;
- Tobing, G.H.S Lumban, 1999 *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta,.
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve;
- Yanti Jacline Jennier Tobing, 2010 “*Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris*”, Media Hukum, ;
- Zainudin Ali, 2007, *sosiologi hukum*, Jakarta: sinar grafika,.
- , 2013 *Metode Penelitian Hukum*, jakarta: sinar grafika,

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-undang nomor 2 tahun 2014 atas perubahan undang-undang No 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris

Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris

Peraturan Lelang(*VenduReglement*) Ordonantie 28 Februari 1908  
Saatblad1908:189

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.07/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

## **3. Internet dan Jurnal Hukum**

### **Jurnal Hukum**

Amalia Dwi,2015kajian hukum terhadap kekuatan akata risalah lelang yang di buat oleh notaris.*Jurnal Hukum*, vol:3.

Hasyim Amir, kewenangan notaris sebagai pejabat lelang kelas II berdsrkan peraturan mentri keuangan no:93 tahun 2010*Jurnal Hukum*.Sriwijaya pers.

Rahayu, EkowatiPujining, 2007 Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas II Dalam Pelaksanaannya, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Univesitas Diponegoro, Semarang,.

.RezaGianBenedicta, 2015Analisis Yuridis Kewenangan Notaris Membuat Risalah Lelang. *Jurnal hukum*.No.14TahunIV

Yanti JaclineJennier Tobing,2010 “Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris”, Jurnal Media Hukum.

## **Internet**

Definisi menurut para ahli.com *pengertian risalah* <http://id.risalahlelang.com>  
*Surahminrelevansi menghapus kewenangan notaris*  
<http://www.hukumonline.com>

Mariotedjakonfigurasi hukum pejabat lelang kelas II  
<http://mariotedja.co.id>

Wikipedia, *Menulis referensi dari Internet*, 25 Oktober 2016,  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Notarisprosedur\\_pengangkatan\\_notaris\\_sesuai\\_dengan\\_UUJN](http://id.wikipedia.org/wiki/Notarisprosedur_pengangkatan_notaris_sesuai_dengan_UUJN).





## DAFTAR INDEKS

<p style="text-align: center;"><b>A</b></p> <p>akta, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 41, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 90</p> <p>Akta dibawah tangan, 1</p> <p>alat bukti, 1, 55, 56, 67, 70</p>	<p>kewenangan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 22, 24, 50, 54, 57, 58, 59, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 85, 87, 90</p>
<p style="text-align: center;"><b>B</b></p> <p>Bahan Hukum, 11, 12, 13</p> <p>Berita Acara, 37, 66</p> <p style="text-align: center;"><b>D</b></p> <p>deduktif, 13, 14</p> <p>direktorat, 3, 70</p>	<p style="text-align: center;"><b>L</b></p> <p>legalisasi, 23, 24</p> <p>Lelang, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89</p> <p>lelang eksekusi, 2</p> <p>lelang noneksekusi sukarela, 2</p> <p>Lelang noneksekusi wajib, 2</p> <p><i>lex posterior</i>, 75</p> <p><i>lex specialis</i>, 62, 75</p> <p><i>lex superior</i>, 75</p>
<p style="text-align: center;"><b>E</b></p> <p>eksekusi, 2, 3, 70</p> <p style="text-align: center;"><b>F</b></p> <p>Formal, 56</p>	<p style="text-align: center;"><b>M</b></p> <p>Materiil, 56</p>
<p style="text-align: center;"><b>I</b></p> <p><i>in kracht</i>, 2</p> <p>induktif, 13, 14</p>	<p style="text-align: center;"><b>N</b></p> <p>Negara, 1, 6, 17, 18, 19, 27, 36, 43, 44, 49, 50, 53, 61, 63, 64, 68, 70, 71, 77, 87</p> <p>norma, 7, 9, 21</p> <p>Notaris, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 45, 47, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 94</p>
<p style="text-align: center;"><b>J</b></p> <p>jabatan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 43, 44, 45, 48, 54, 55, 57, 58, 60, 63, 64, 70, 72, 73, 77, 79, 80, 85, 86, 89</p> <p>Jabatan Notaris, 3, 6, 7, 8, 9, 18, 20, 22, 24, 25, 54, 70, 73, 75, 84, 87, 88</p>	<p style="text-align: center;"><b>O</b></p> <p>objek, 12, 38</p> <p>otentik, 1, 3, 4, 17, 18, 22, 23, 41, 42, 54, 55, 56, 67, 70, 71, 72, 75, 84</p>
<p style="text-align: center;"><b>K</b></p> <p>kenotariatan, 3, 19, 72, 74</p>	

## **P**

pejabat lelang, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15,  
16, 32, 49, 57, 62, 63, 69, 71, 73, 74,  
75, 77, 78, 82, 89, 90, 93

Pejabat Lelang, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13,  
15, 17, 21, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42,  
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,  
53, 54, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66,  
67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,  
78, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89

pejabat umum, 1, 3, 4, 17, 18, 22, 54,  
55, 56, 62, 72

Pembuktian, 56

penawaran, 2, 31, 32, 33, 34, 38, 43, 45,  
52, 62, 69

pengadilan, 2, 27, 31

penjualan, 2, 5, 6, 31, 32, 33, 34, 35, 39,  
40, 41, 42, 44, 49, 50, 58, 62, 63, 64,  
65, 66, 69, 79, 82, 85

Penyitaan, 37

peraturan, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 18,  
23, 27, 29, 33, 34, 35, 44, 45, 52, 56,  
61, 62, 63, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 79,  
82, 84, 85, 87, 89

peraturan lelang, 7, 35

perundang – undangan, 2, 6, 73

profesi, 3, 47, 48, 54, 55, 70, 72, 86

## **R**

risalah lelang, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 25,  
54, 57, 60, 63, 73, 75, 77, 78, 79, 81,  
84, 85, 89, 90

## **S**

sosial, 3, 72

Staatsblad, 9, 61

## **T**

tehnologi, 87

## **U**

urgent, 3, 72

## **V**

Vendu Reglement, 5, 6, 7, 11, 15, 61,  
62, 73, 74, 75, 77, 79, 81

## **W**

**Wewenang**, 22, 49

